

# EVALUASI KINERJA PEREKONOMIAN REGIONAL DAN SEKTORAL DI KABUPATEN BANGKALAN MELALUI ANALISIS SHIFT SHARE

**Kurniyati Indahsari**

*Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi – Fakultas Ekonomi Unijoyo*

## ABSTRAKSI

*Evaluasi kinerja perekonomian regional dan sektoral secara berkala dan rutin diperlukan untuk melihat indikasi apakah terdapat wilayah/region yang tertinggal atau maju di berbagai sektor maupun sektor-sektor yang tertinggal atau maju di berbagai wilayah. Melalui analisis shift share penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengevaluasi kinerja perekonomian regional dan sektoral di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2002-2005, sehingga dapat diketahui: (1) tingkat perkembangan perekonomian kecamatan-kecamatan maupun sektor-sektor di Kabupaten Bangkalan; dan (2) sektor unggulan di setiap kecamatan.*

*Penelitian menunjukkan bahwa ada kesenjangan spasial antara kelompok kecamatan di bagian barat dan selatan (pertumbuhan ekonomi maju) dan kelompok kecamatan di bagian tengah dan timur (pertumbuhan ekonomi lamban). Pertumbuhan sektor sekunder dan terutama sektor tersier yang merupakan penunjang utama dalam proses industrialisasi ternyata tidak secepat/seproduktif yang diharapkan. Sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian kabupaten justru memiliki pertumbuhan yang lamban.*

*Karenanya disarankan untuk memprioritaskan kelompok kecamatan di bagian tengah dan timur dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Bangkalan. Disarankan pula untuk menerapkan industri dan bisnis berbasis pertanian (agroindustri dan agribisnis). Untuk kepentingan investasi disarankan untuk melakukan pengkajian lanjutan yang bertujuan untuk menentukan lokasi (sub kecamatan) dan komoditas (bukan sektor) unggulan di setiap kecamatan.*

**Kata Kunci :** *Analisis Shift Share, indikator ekonomi makro dan sektor unggulan*

## PENDAHULUAN

Undang-undang (UU) no. 22 tahun 1999 yang direvisi dalam UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan pusat dan daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Pemerintah kabupaten punya kewenangan yang lebih besar dalam merencanakan arah pembangunan serta melaksanakannya.

Dalam kondisi seperti ini paradigma pembangunan yang dianut pemerintah daerah akan mempengaruhi keberhasilannya untuk

mensejahterakan rakyatnya secara merata. Jika paradigma yang dianut dilandaskan pada *First Fundamental Theorem of Welfare Economics*, maka pemerintah daerah cenderung akan menekankan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi/efisiensi (aspek ekonomi) dan mengabaikan unsur pemerataan. Akibatnya, pemerintah hanya memusatkan perhatian dan mengalokasikan sumberdaya yang ada kepada sektor-sektor atau wilayah yang berpotensi besar menyumbang pada pertumbuhan ekonomi. Implikasi dari penekanan pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah polarisasi geografis alokasi investasi yang mendorong ketimpangan pembangunan antar wilayah melalui pengaruh aglomerasi lokasi industri di tempat yang memiliki keuntungan kompetitif, yaitu daerah perkotaan, melalui kebijakan-kebijakan yang *urban biased*. Dampak berikutnya adalah akan terjadi ketimpangan-ketimpangan sektoral, individual/kelompok, teknologi, dan spasial.

Kebijakan pembangunan yang ideal justru pada pembangunan yang didasarkan pada paradigma *the second fundamental theorem of Welfare Economic*. Jika pemerintah daerah menganut paradigma ini maka prioritas pembangunan akan terletak pada pemerataan yang bisa mendukung pembangunan/pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini bisa terjadi jika investasi terjadi di semua sub region (kecamatan), terutama pada sektor-sektor yang dianggap potensial (unggulan) di wilayah tersebut. Implikasinya adalah akan terjadi percepatan pertumbuhan perekonomian di semua sub region sehingga secara keseluruhan akan mempertinggi kinerja perekonomian kabupaten. Dengan demikian, untuk menuju masyarakat yang adil dan sejahtera, pemerintah daerah kabupaten menganut paradigma kedua sebagai dasar penentuan kebijakan pembangunan regionalnya.

Salah satu upaya mencegah atau mengatasi ketimpangan sektoral dan spasial adalah pemerintah daerah harus mengenal potensi maupun kelemahan sektor-sektor perekonomian dan kecamatan-kecamatan di daerahnya. Evaluasi kinerja perekonomian regional dan sektoral secara berkala dan rutin dapat dilakukan untuk melihat indikasi apakah terdapat wilayah/region yang tertinggal atau maju di berbagai sektor maupun sektor-sektor yang tertinggal atau maju di berbagai wilayah.

Untuk pemantauan pembangunan, pemerintah Kabupaten Bangkalan sebagai daerah otonom seharusnya melakukan evaluasi kinerja perekonomian secara rutin. Hingga era awal pelaksanaan otonomi daerah (tahun 1999) hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan antar kecamatan, bahkan mengarah pada polarisasi antara kelompok kecamatan di wilayah barat/utara dan timur/selatan (Indahsari, 2001). Wilayah sebelah barat/utara, antara lain Kecamatan Kamal, Labang, Socah, Bangkalan, Arosbaya, Burneh, Klampis, Sepulu dan Tanjung Bumi, dicirikan oleh penduduk yang relatif padat, sektor tersier yang lebih dominan, dan tingkat perkembangan kecamatan yang relatif tinggi. Sementara itu, kelompok

kecamatan di wilayah timur/selatan (9 kecamatan lain yang tidak disebutkan di atas) memiliki pola yang berlawanan.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah ketimpangan regional tersebut tetap ada hingga saat ini? Jika masih terjadi, maka untuk mengatasinya, sektor-sektor apa yang menjadi potensi (unggulan) di setiap kecamatan?

Untuk menjawabnya perlu dilakukan evaluasi kinerja perekonomian regional dan sektoral yang hasilnya bisa dijadikan landasan untuk pemetaan investasi yang tepat secara regional maupun sektoral sehingga konsep pemerataan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di tingkat kabupaten dapat diterapkan. Tulisan ini akan menguraikan hasil evaluasi tersebut dengan menggunakan analisis *shift share*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Indikator Kinerja Perekonomian*

Dalam teori Ekonomi Makro, pengukuran output perekonomian serta laju pertumbuhannya diperlukan sebagai tolak ukur kinerja pembangunan ekonomi. Di tingkat nasional, output perekonomian ini bisa diukur dari Produk Nasional Bruto (PNB) yang didefinisikan sebagai total nilai nominal seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama satu tahun tertentu (Samuelson dan Nordhaus, 1992). Ukuran lain adalah Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu nilai output akhir yang dihasilkan perekonomian (baik oleh penduduk warga negara yang bersangkutan ataupun warga negara asing) di wilayah suatu negara. PNB adalah PDB ditambah pendapatan milik warga negara yang bersangkutan di luar negeri dan dikurangi pendapatan milik warga negara asing yang bermukim di wilayah negara tersebut (Todaro, 1997). Dengan demikian, penggunaan PNB akan lebih menunjukkan kinerja perekonomian suatu negara daripada penggunaan PDB. Walaupun demikian, dalam konteks pengukuran kinerja perekonomian di wilayah yang lebih sempit, misalnya di tingkat propinsi atau kabupaten (dalam suatu negara), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan variabel ekonomi utama yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian regional, yaitu dengan melihat laju pertumbuhan PDRB.

Laju pertumbuhan PNB ataupun PDRB bukanlah satu-satunya indikator pengukur kinerja perekonomian. Inflasi dan pengangguran adalah indikator ekonomi lain yang lazim digunakan (Donbursh dan Fisher, 1996). Bahkan sejak paradigma baru pembangunan, yaitu the second fundamental teorm of welfare economic, banyak dianut oleh banyak negara di dunia (awal tahun 1990-an), indikator-indikator ekonomi tersebut harus didampingi oleh indikator sosial (non ekonomi) untuk mengukur kinerja pembangunan. Dari sekian banyak indikator sosial, yang paling menonjol adalah indikator yang

diupayakan PBB yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (Todaro, 1997).

Dalam penelitian ini tidak semua indikator makro kinerja perekonomian akan dilihat/diukur. Penelitian dibatasi pada analisis indikator ekonomi, dalam hal ini PDRB, untuk mengevaluasi kinerja pembangunan sektoral maupun regional.

### ***Analisis Shift Share***

Budiharsono (1985) mengemukakan bahwa analisis *shift share* telah digunakan oleh beberapa ahli untuk berbagai kebutuhan. Diantaranya adalah untuk mengidentifikasi sumber pertumbuhan ekonomi wilayah di Amerika Serikat, seperti yang dilakukan oleh Perloff, et. Al.. Analisis ini juga digunakan oleh Lucas (1979) untuk mengidentifikasi pertumbuhan sektor-sektor atau wilayah yang lamban di Indonesia dan Amerika Serikat. Selain itu, analisis ini juga bisa digunakan untuk menduga dampak kebijakan wilayah pada produksi dan ketenagakerjaan seperti yang telah dilakukan oleh Tervo dan Okko (1982).

Seyfried (\_\_\_) menggunakan analisis ini untuk menentukan posisi kompetitif setiap negara bagian di Amerika bagian selatan. Dari hasil analisis ini Seyfried mengidentifikasi wilayah/negara bagian yang memiliki keunggulan kompetitif dalam struktur industri.

Inti dari analisis *shift share* adalah menganalisis perubahan berbagai indikator ekonomi, seperti produksi/PDB/PDRB atau tenaga kerja pada dua titik waktu. Dalam analisis ini diasumsikan bahwa perubahan indikator ekonomi tersebut dapat dibagi menjadi tiga komponen, yaitu komponen pertumbuhan nasional, komponen pertumbuhan proporsional, dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah.

Komponen pertumbuhan nasional adalah perubahan kesempatan kerja/produksi yang disebabkan oleh kondisi perekonomian nasional, misalnya devaluasi atau inflasi, pengangguran, kebijakan perpajakan, atau lainnya. Secara matematis, besarnya komponen pertumbuhan nasional sektor ke-i wilayah ke-j ( $PN_{ij}$ ) adalah sama dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja/produksi dalam 2 titik waktu yang dianalisis dikalikan dengan PDRB sektor ke-i wilayah ke-j tahun awal Analisis:

$$PN_{ij} = \frac{X'_{ij} - X_{ij}}{X_{ij}} \cdot X_{ij} = \left( \frac{X'_{ij}}{X_{ij}} - 1 \right) \cdot X_{ij}$$

dengan  $X'_{ij}$  dan  $X_{ij}$  masing-masing adalah tenaga kerja/produksi tahun akhir dan tahun dasar analisis.  $PN \geq 0$  berarti terjadi laju pertumbuhan tenaga kerja/produksi positif (maju), dan sebaliknya untuk  $PN < 0$ .

Komponen pertumbuhan proporsional/sektoral timbul karena perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan ketersediaan bahan mentah, perbedaan kebijakan sektoral, maupun struktur dan keragaan pasar. Secara matematis, besarnya komponen pertumbuhan proporsional sektor ke-i wilayah ke-j ( $PP_{ij}$ ) sama dengan laju pertumbuhan sektoral

dikurangi dengan laju pertumbuhan nasional dikalikan dengan PDRB sektor ke-i wilayah ke-j tahun awal Analisis.

$$PP_{ij} = \left( \frac{X'_{i.}}{X_{i.}} - \frac{X'_{..}}{X_{..}} \right) \cdot X_{ij};$$

dengan  $X'_{i.}$  dan  $X_{i.}$  masing-masing adalah tenaga kerja/produksi sektor ke-i pada tahun akhir dan awal analisis.

Dari hasil perhitungan ini akan didapatkan sektor-sektor yang relatif 'maju' atau 'lamban' di tingkat kabupaten. Sektor dengan  $PP_i \geq 0$  adalah sektor "maju" yang berarti pertumbuhan sektor tersebut lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan nasional, dan sebaliknya untuk  $PP_i < 0$ .

Komponen pertumbuhan pangsa lokal (PL) timbul karena peningkatan atau penurunan tenaga kerja/produksi dalam suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Cepat atau lambannya pertumbuhan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar, prasarana sosial ekonomi serta kebijakan regional. Secara matematis, besarnya komponen pertumbuhan pangsa lokal sektor ke-i wilayah ke-j ( $PL_{ij}$ ) sama dengan pengurangan laju pertumbuhan sektor ke-i wilayah ke-j dengan laju pertumbuhan sektor yang bersangkutan dikalikan dengan PDRB sektor ke-i wilayah ke-j tahun awal Analisis.

$$PL_{ij} = \left( \frac{X'_{ij}}{X_{ij}} - \frac{X'_{i.}}{X_{i.}} \right) \cdot X_{ij};$$

dengan  $X'_{ij}$  dan  $X_{ij}$  masing-masing adalah tenaga kerja/produksi sektor ke-i wilayah ke-j pada tahun akhir dan awal analisis.

Penjumlahan dua komponen pertumbuhan wilayah, yaitu  $PP_{ij}$  dan  $PL_{ij}$ , disebut pergeseran bersih sektor ke-i wilayah ke-j ( $PB_{ij}$ ) dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan suatu wilayah. Secara matematis:

$$PB_{ij} = PP_{ij} + PL_{ij}$$

$$PB_{.j} = PP_{.j} + PL_{.j}$$

$PB_{ij} \geq 0$  berarti pertumbuhan sektor ke-i wilayah ke-j termasuk kelompok maju, dan sebaliknya untuk  $PB_{ij} < 0$ .  $PB_{.j} \geq 0$  berarti pertumbuhan wilayah ke-j termasuk kelompok maju dan sebaliknya untuk  $PB_{.j} < 0$ .

## METODOLOGI

### *Metode Pengumpulan Data*

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang ada di Kantor Badan Pusat Statistik. Data utama yang dibutuhkan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tiap sektor perekonomian di setiap kecamatan di Kabupaten Bangkalan untuk dua periode. Dalam penelitian ini, data yang dianalisis adalah PDRB Tahun 2002 dan 2005 atas dasar harga konstan 2000.

Dalam penelitian ini akan dianalisis shift share seluruh (18) kecamatan dan 9 sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Bangkalan. Delapan belas kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kamal, Labang, Kwanyar, Modung, Blega, Konang, Galis, Tanah Merah, Tragah, Socah, Bangkalan, Burneh, Arosbaya, Geger, Kokop, Tanjung Bumi, Sepulu, dan Klampis. Sementara itu ke 9 sektor adalah pertanian dalam arti luas (pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan), pertambangan dan galian, industri pengolahan, listrik-gas-air bersih, konstruksi, perdagangan-hotel-restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan-persewaan-jasa perusahaan, dan jasa-jasa.

### ***Analisis Data***

Prinsip analisis shift share diterapkan untuk menganalisis perubahan produksi (PDRB) kabupaten maupun kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Oleh karena analisis ini diterapkan pada wilayah yang lebih kecil, yaitu kabupaten, maka komponen pertumbuhan nasional yang dimaksud adalah komponen pertumbuhan kabupaten, dan komponen pertumbuhan pangsa lokal yang dimaksud adalah pangsa kecamatan. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan penelitian, rumus-rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Untuk mengidentifikasi tingkat/laju pertumbuhan kabupaten dipergunakan rumus PN (dalam persen):

$$PN = \frac{X'_{..} - X_{..}}{X_{..}} \cdot 100\% = \left( \frac{X'_{..}}{X_{..}} - 1 \right) \cdot 100\%$$

Untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan sektor-sektor (sektor unggulan) di Kabupaten Bangkalan dipergunakan  $PP_i$ .

$$PP_i = \left( \frac{X'_{i.}}{X_{i.}} - \frac{X'_{..}}{X_{..}} \right) \cdot 100\%$$

Jika  $PP_i \geq 0$  maka sektor ke-i tergolong sektor unggulan

Untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan kecamatan-kecamatan (kecamatan unggulan) di Kabupaten Bangkalan dipergunakan  $PB_j$

Untuk mengidentifikasi sektor unggulan di setiap kecamatan dipergunakan  $PB_{ij}$

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Laju Pertumbuhan Kabupaten Bangkalan***

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan dari tahun 2002 hingga 2005 yang diukur dari PDRB tahun yang bersangkutan atas dasar harga konstan 2000 adalah sebesar 14,02%. Ini berarti pertumbuhan per tahun rata-rata sebesar 4,2%. Secara lebih rinci, pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangkalan tahun 2003, 2004 dan 2005 dibandingkan setahun sebelumnya masing-masing sebesar 4,1%, 4,6% dan 4,7%. Jika dibandingkan dengan laju

pertumbuhan ekonomi nasional yang pada tahun 2005 dibanding tahun 2004 sebesar 5,6% (BPS, 2006), maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan tergolong lebih rendah. Pemerintah Kabupaten Bangkalan harus berusaha mengejar ketertinggalan ini.

### *Tingkat Perkembangan Sektor Unggulan di Kabupaten Bangkalan*

Sektor unggulan yang dimaksud di sini adalah sektor yang terkategori maju karena memiliki laju pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten. Di **Tabel 1** dapat dilihat bahwa 6 dari 9 sektor yang ada tergolong sektor unggulan. Namun jika dipilih tiga tertinggi, maka sektor yang memberikan laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor listrik-gas-air, pertambangan dan galian, dan konstruksi. Sementara itu, pertanian (dalam arti luas), perdagangan-hotel-restoran, dan jasa-jasa lainnya tergolong sektor dengan laju pertumbuhan di bawah laju pertumbuhan kabupaten.

**Tabel 1. Pertumbuhan Sektor-sektor Perekonomian di Kabupaten Bangkalan Tahun 2002 -2005**

Sektor	Pertumbuhan 2002-2005			Kontribusi thd PDRB Kabupaten Tahun 2005 (%)
	Sektoral (%)	PP <sub>i</sub> (%)	Kategori	
Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan	4,9	-9,2	Lamban	38
Pertambangan dan galian	83,4	69,2	Maju	1
Industri pengolahan	14,9	0,7	Maju	4
Listrik, gas, air	87,0	72,8	Maju	2
Konstruksi	65,5	51,3	Maju	7
Perdagangan, hotel, restoran	12,6	-1,6	Lamban	22
Pengangkutan dan komunikasi	19,1	4,8	Maju	11
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	21,7	7,5	Maju	4
Jasa-jasa lainnya	13,3	-0,8	Lamban	11

Sumber: Hasil olahan data PDRB per Sektor Kabupaten Bangkalan, Tahun 2002 dan 2005

Kondisi ini sebenarnya cukup riskan mengingat sektor-sektor yang terkategori lamban pertumbuhannya adalah sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian kabupaten pada tahun 2005. Jika ini dibiarkan dan terus terjadi bukan tidak mungkin suatu saat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan akan negatif. Meskipun transformasi struktural perekonomian kabupaten Bangkalan dari sektor pertanian (primer) ke sekunder (industri pengolahan) atau tersier (sektor lainnya) mulai terlihat

(BPS dan Bappeda Kabupaten Bangkalan, 2006) namun hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan sektor tersier – terutama perdagangan-hotel-restoran yang memberikan kontribusi cukup besar – tidak secepat atau seproduktif yang diharapkan. Faktor yang kemungkinan mempengaruhi hal ini adalah karena sektor ini didominasi oleh pekerja yang berstatus informal (sektor informal) yang memiliki karakteristik produktifitas rendah. Kemungkinan ini perlu diuji melalui penelitian yang lain.

### ***Tingkat Perkembangan Kecamatan di Kabupaten Bangkalan***

Kecamatan yang tergolong unggul adalah kecamatan yang berdasarkan hasil analisis shift share memiliki besaran pergeseran bersih ekonomi (PB.j) positif. Nilai positif ini berarti laju pertumbuhan perekonomian kecamatan lebih tinggi (maju) dibandingkan laju pertumbuhan perekonomian kabupaten. Berdasarkan hasil analisis shift share tahun 2002-2005, separuh dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan tergolong maju (**Tabel 2**). Jika dibandingkan dengan hasil analisis shift share terhadap PDRB tahun 1993-1998, maka ada lima kecamatan yang secara konsisten tergolong kecamatan unggul, yaitu Kamal, Socah, Bangkalan, Burneh, dan Tanjung Bumi. Tujuh kecamatan yang konsisten memiliki pertumbuhan lamban adalah Kwanyar, Konang, Galis, Tanah Merah, Tragah, Geger, dan Kokop. Sementara itu, 4 kecamatan yang berubah menjadi maju pertumbuhannya – yaitu Labang, Modung, Blega dan Arosbaya – dan sisanya justru mengalami kelambanan pertumbuhan ekonomi, yaitu Sepulu dan Klampis.

Kecamatan yang tergolong unggul adalah kecamatan yang berdasarkan hasil analisis shift share memiliki besaran pergeseran bersih ekonomi (PB.j) positif. Nilai positif ini berarti laju pertumbuhan perekonomian kecamatan lebih tinggi (maju) dibandingkan laju pertumbuhan perekonomian kabupaten. Berdasarkan hasil analisis shift share tahun 2002-2005, separuh dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan tergolong maju (**Tabel 2**). Jika dibandingkan dengan hasil analisis shift share terhadap PDRB tahun 1993-1998, maka ada lima kecamatan yang secara konsisten tergolong kecamatan unggul, yaitu Kamal, Socah, Bangkalan, Burneh, dan Tanjung Bumi. Tujuh kecamatan yang konsisten memiliki pertumbuhan lamban adalah Kwanyar, Konang, Galis, Tanah Merah, Tragah, Geger, dan Kokop. Sementara itu, 4 kecamatan yang berubah menjadi maju pertumbuhannya – yaitu Labang, Modung, Blega dan Arosbaya – dan sisanya justru mengalami kelambanan pertumbuhan ekonomi, yaitu Sepulu dan Klampis.



**Tabel 2. Pengkategorian Pertumbuhan Perekonomian Kecamatan-kecamatan di Bangkalan Berdasarkan Hasil Analisis Shift Share (ASS) Tahun 2002-2005 dan 1993-1998**

Kecamatan	Tahun 2002-2005**		Tahun 1993-1998*
	Kategori Hasil ASS	Kontribusi thd PDRB Kab Tahun 2005 (%)	Kategori Hasil ASS
Kamal	Maju	8,5	Maju
Labang	Maju	4,6	Lamban
Kwanyar	Lamban	5,5	Lamban
Modung	Maju	4,9	Lamban
Blega	Maju	5,4	Lamban
Konang	Lamban	3,2	Lamban
Galis	Lamban	6,5	Lamban
Tanah Merah	Lamban	6,0	Lamban
Tragah	Lamban	2,4	Lamban
Socah	Maju	4,7	Maju
Bangkalan	Maju	11,7	Maju
Burneh	Maju	5,3	Maju
Arosbaya	Maju	5,6	Lamban
Geger	Lamban	4,8	Lamban
Kokop	Lamban	3,5	Lamban
Tanjung Bumi	Maju	5,9	Maju
Sepulu	Lamban	4,9	Maju
Klampis	Lamban	6,5	Maju

Sumber: \* Berdasarkan penelitian Indahsari (2001)

\*\* Hasil olahan data PDRB per Kecamatan per Sektor di Bangkalan, Tahun 2002 dan 2005

Jika diperhatikan sebaran spasialnya, kecamatan-kecamatan yang terkategori maju ini berada di bagian barat Kabupaten Bangkalan sementara kelompok kecamatan yang lamban pertumbuhan ekonominya berada di bagian tengah dan timur. Meskipun ada beberapa pergeseran (perbaikan), misalnya meningkatnya kategori pertumbuhan kecamatan di bagian timur dan selatan - yaitu Blega dan Modung, namun kondisi ini seharusnya menjadi catatan bagi pemerintah daerah Bangkalan bahwa masih ada kelompok kecamatan yang perlu prioritas pengembangan karena telah lebih dari 10 tahun (setidaknya dari tahun 1993) memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lamban. Kelompok kecamatan yang dimaksud adalah 7 kecamatan yang terletak di bagian tengah dan timur Kabupaten Bangkalan yang secara konsisten tergolong lamban pertumbuhan ekonomi.

Beberapa kecamatan yang terkategori lamban tersebut sebenarnya memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian kabupaten, misalnya saja kecamatan Galis, Tanah Merah, dan Kwanyar yang memiliki kontribusi lebih besar atau sama dengan besarnya rata-rata kecamatan, yaitu 5,5%. Perubahan yang tinggi pada pertumbuhan ekonomi

kecamatan yang memiliki kontribusi relatif tinggi ini akan memberikan pertumbuhan ekonomi kabupaten yang relatif tinggi pula.

### *Sektor Unggulan di Setiap Kecamatan*

Melalui analisis shift share, kita dapat melihat sektor-sektor unggulan di setiap kecamatan. Sektor unggulan yang dimaksud adalah sektor di setiap kecamatan yang memiliki besaran pergeseran bersih positif dalam hasil analisis shift share.

**Tabel 3. Kategori Pertumbuhan Per Sektor Per Kecamatan di Kabupaten Bangkalah Berdasarkan Hasil Analisis Shift Share Tahun 2002-2005**

Kecamatan	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Kamal	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Labang	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Kwanyar	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Modung	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Blega	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Konang	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Galis	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Tanah Merah	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Tragah	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Socah	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bangkalan	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Burneh	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Arosbaya	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Geger	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Kokop	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Tanjung Bumi	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sepulu	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Klampis	L	L	L	L	L	L	L	L	L

S1 : Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan

S2 : Pertambangan dan galian

S3 : Industri pengolahan

S4 : Listrik, gas, air

S5 : Konstruksi

S6 : Perdagangan, hotel dan restoran

S7 : Pengangkutan dan komunikasi

S8 : Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan

S9 : Jasa-jasa

M : Kategori "maju"

L : Kategori "lamban"

Sumber: Hasil olahan data PDRB per Kecamatan per Sektor Kabupaten Bangkalah, Tahun 2002 dan 2005

**Tabel 3** memperlihatkan bahwa sektor unggulan di setiap kecamatan belum bisa teridentifikasi secara spesifik. Seluruh sektor yang berada di kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi maju terkategori maju, dan sebaliknya yang berada di kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi lamban. Ini berarti bahwa keberhasilan atau ketidak-berhasilan pertumbuhan ekonomi kecamatan ditentukan oleh keberhasilan atau ketidakberhasilan pertumbuhan keseluruhan sektor yang berada di kecamatan yang bersangkutan. Karenanya, untuk kepentingan penentuan investasi yang tepat di setiap kecamatan disarankan untuk melakukan identifikasi komoditas (bukan sektor) unggulan di setiap kecamatan melalui suatu penelitian tersendiri.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis shift share tahun 2002-2005, kesenjangan spasial (antar kecamatan) masih terjadi di Kabupaten Bangkalan. Kelompok kecamatan yang berada di bagian barat dan selatan Kabupaten Bangkalan tergolong maju pertumbuhan ekonominya, dan sebaliknya untuk untuk kelompok kecamatan yang berada di bagian tengah dan timur. Karenanya, untuk pelaksanaan paradigma baru pembangunan yang mengutamakan pemerataan yang mendukung pertumbuhan (the second fundamental theorem of welfare economic) maka disarankan untuk memprioritaskan kelompok kecamatan di bagian tengah dan timur dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Bangkalan.

Pertumbuhan sektor sekunder dan terutama sektor tersier yang merupakan penunjang utama dalam proses industrialisasi ternyata tidak secepat/seproduktif yang diharapkan. Selain itu, sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian kabupaten, seperti pertanian dan perdagangan-hotel-restoran, justru memiliki pertumbuhan yang lamban. Karenanya disarankan untuk menerapkan industri dan bisnis berbasis pertanian (agroindustri dan agribisnis), yang berarti tetap meletakkan basis perekonomian pada pertanian dengan modifikasi ke arah industri dan bisnis sehingga produktifitas dapat meningkat. Jika hipotesa benar bahwa lambannya pertumbuhan sektor perdagangan-hotel-restoran disebabkan oleh dominasi sektor informal, maka pelaksanaan program-program untuk sektor ini perlu ditingkatkan sehingga mampu meningkatkan produktifitas sektor ini secara keseluruhan.

Mengingat hasil analisis shif share belum bisa mengidentifikasi sektor unggulan di masing-masing kecamatan yang bisa digunakan sebagai dasar kebijakan pelaksanaan investasi, maka disarankan untuk melakukan pengkajian lanjutan yang bertujuan untuk menentukan lokasi (sub kecamatan) dan komoditas (bukan sektor) unggulan di setiap kecamatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2006. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2005 dalam Berita Resmi Statistik No. 9 / IX / 15 Februari 2006.
- Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappeda Kabupaten Bangkalan. 2006. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangkalan Tahun 2005.
- Budiharsono, S. 1985. Perencanaan Pembangunan Wilayah: Teori, Model dan Penerapannya.
- Dornbusch, Rudiger dan Stanley Fischer. 1996. Makro Ekonomi. Penerbit Erlangga.
- Indahsari, Kurniyati. 2001. Penentuan Prioritas Pembangunan Berdasarkan Tingkat Perkembangan Kecamatan dan Potensi Wilayah (Studi Kasus Kabupaten Bangkalan).
- Samuelson, Paul A. Dan William D. Nordhaus. 1992. Makro Ekonomi, ed. 14. Penerbit Erlangga.
- Seyfried, William. \_\_\_\_\_. Examining the Economic Competitiveness of the Economics of the Southern United States.
- Todaro, Michael P. 1998. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, ed. 6, jilid 1. Penerbit Erlangga.